



***“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA TANAH BERGERAK DI DESA DERMASUCI, KECAMATAN
PANGKAH, KABUPATEN TEGAL”***

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata S1 Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

LULU NABILAH

NIM. 2120600029

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lulu Nabilah
NPM : 2120600029
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 18 Maret 2002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : ***Collaborative Governance* Dalam
Penanggulangan Bencana Tanah Bergerak Di
Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah,
Kabupaten Tegal**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 9 Februari 2025


Lulu Nabilah



PERSETUJUAN

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA TANAH BERGERAK DI DESA DERMASUCI, KECAMATAN
PANGKAH, KABUPATEN TEGAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

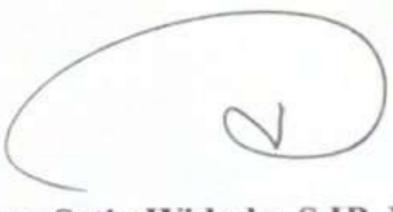
Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 05 Februari 2025
Telah disetujui oleh

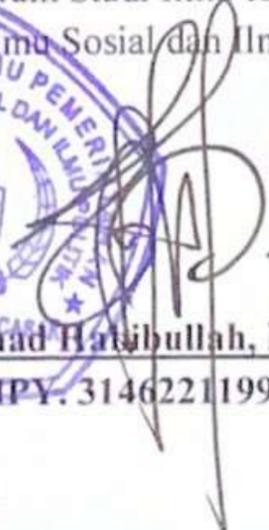
Dosen Pembimbing I


Arif Zainudin, M.IP.
NIPY. 20964101988

Dosen Pembimbing II


H. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY. 16952681974

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Akhmad Hatibullah, M.IP
NIPY. 31462211994



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
(Terakreditasi Baik Sekali)**

Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283)323290

PENGESAHAN SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA TANAH BERGERAK DI DESA DERMASUCI, KECAMATAN
PANGKAH, KABUPATEN TEGAL**

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

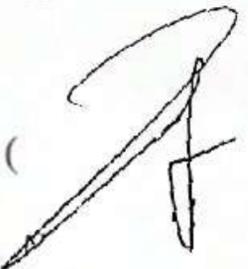
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 05 Februari 2025

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 19630527198832001

()
()

2. Anggota Dewan Penguji : H. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY. 16952681974

3. Anggota Dewan Penguji : Arif Zainudin, M.IP
NIPY. 20964101988

()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Unggul Sugi Harto, M.Si
NIPY. 14251921973

MOTTO

*“Jadilah seperti lilin, menyinari kegelapan walau harus mengorbankan diri untuk
memberikan cahaya bagi orang lain.”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, dan dukungan dan doa dari orang tercinta, skripsi ini akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu. Alhamdulillahirobil'alamin. Akibatnya, dengan rasa bangga dan kegembiraan

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kepada perempuan kuat dan hebat yang memiliki kesabaran dan keikhlasan yang amat luas yang bekerja sebagai penjual makanan sejak aku kecil hingga dewasa. Perempuan itu mamaku, Siti Mualiyah. Yang selalu melangitkan namaku disetiap do'anya dan sholatnya di sela-sela kesibukannya berjualan. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya.
2. Kepada lelaki kuat dan keras kepala yang telah mendidik keras aku sedari kecil hingga dewasa, dan mengajarkan kerasnya bertarung di kehidupan ini. Yaitu Bapakku, Muhammad Wahyono. Terimakasih telah mengajarku arti sesungguhnya kehidupan yang begitu keras ini untuk seorang anak bungsu Perempuan yang seharusnya manja tetapi menjadi Perempuan yang kuat dalam menghadapi segalanya.
3. Kepada kakakku tercinta Nurul Alfiani, yang menjagaku dan merawatku ketika kita jauh dari orangtua, tak terasa adikmu yang malas mandi sejak kecil ini sudah berhasil menyelesaikan skripsinya dan berhasil lulus kuliah.
4. Kepada ponakanku tercinta, Galendra Bramantya Yodha Habibie atau yang sering ku panggil dengan nama "OTUT" yang setiap malam dan hampir setiap hari memberikan semangat via *video call* dengan menunjukkan tingkah lucunya

5. Kepada para dosen pembimbing telah sabar memberikan bimbingan, pengetahuan, dan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman ilmu pemerintahan angkatan 2020, terutama Saniya, Fathur, Sabrina dan Iqbal yang telah menemani selama hampir empat tahun dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
7. Kepada teman-teman di Warung Bebakaran Pangkah dan CV. Bintang Paseduluran 58 Mapan yang telah membersamai saya di perjalanan ini, bukan hanya menjadi teman kerja melainkan sudah seperti keluarga, yang siap sedia ketika saya membutuhkan bantuan, dan menemani suka duka saya dalam bekerja sekaligus menimba ilmu
8. Untuk diri saya sendiri, Lulu Nabilah. Sebagai anak bungsu perempuan yang kehilangan masa jaya orangtua, aku telah belajar untuk bangkit dan berjuang meski dalam kesulitan. Dengan tekad dan semangat, meskipun perjalanan ini tidak mudah, saya bangga dapat membiayai kuliah saya sendiri dengan kerja keras dan ketekunan. Saya menghargai setiap langkah yang telah saya ambil, setiap jam yang saya habiskan untuk bekerja, dan setiap peluh yang saya keluarkan untuk meraih impian ini. Saya telah belajar untuk mandiri dan beradaptasi, serta menemukan kekuatan dalam diri yang tidak pernah saya duga ada dalam menghadapi setiap rintangan yang datang. Setiap langkah yang saya ambil adalah bukti kekuatan yang ada dalam diri ini. Saya berjanji untuk terus melangkah maju, menghormati kedua orangtua, dan mewujudkan impian yang mereka harapkan untuk saya.

Terima kasih, diri ini, atas ketahanan dan kerja kerasnya. Saya bangga pada diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH BERGERAK DI DESA DERMASUCI, KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL” Tujuan penyusunan skripsi ini adalah penyelesaian studi strata S1 untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menghadapi bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP., selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Arif Zainudin, M.IP., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesai penulisan skripsi ini di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.

5. Bapak H. Agus Setio Widodo, S.IP.,M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesai penulisan skripsi ini di sela-sela kesibukan kegiatannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna bagi peneliti.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang tak kenal lelah dalam memberi pelayanan administrasi bagi mahasiswa.
8. Bapak dan ibu beserta keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi
9. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang serta memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
10. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu atas dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan sarannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Tegal, 6 Februari
2025

Lulu Nabilah

ABSTRAK

Nabilah, Lulu 2120600029. Pembimbing 1 Arif Zainudin, M.IP dan Pembimbing 2 H. Agus Setio Widodo, S.IP.,M.Si. *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Bergerak Di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Penelitian ini mengeksplorasi proses *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kabupaten Tegal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor, dengan berbagai pihak seperti BPBD, PMI, TNI/Polri, Puskesmas, LSM, Swasta, Masyarakat dan pemerintah desa, yang aktif membangun kepercayaan, berkomunikasi secara terbuka, dan berkomitmen terhadap proses tersebut. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran, perbedaan prosedur antar instansi, dan kurangnya pemahaman antara pemerintah dan masyarakat juga ditemukan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi di masa mendatang, termasuk fokus pada strategi pencegahan jangka panjang, peningkatan edukasi dan penggunaan teknologi, penguatan koordinasi dan pembagian tugas, serta optimalisasi peran pemerintah desa dalam mitigasi bencana.

Kata Kunci: *collaborative governance*, hambatan, penanggulangan bencana, tanah bergerak, Kabupaten Tegal

ABSTRACT

Nabilah, Lulu 2120600029. Supervisor 1 Arif Zainudin, M.IP and Supervisor 2 H. Agus Setio Widodo, S.IP., M.Sc. Collaborative governance in mobile land disaster management in dermasuci village, pangkah sub-district, tegal regency.

This study explores the process of collaborative governance in managing landslide disasters in Dermasuci Village, Tegal Regency, using a descriptive qualitative approach and case study design. The findings indicate a successful cross-sector collaboration involving various parties such as BPBD (Regional Disaster Management Agency), PMI (Indonesian Red Cross), TNI (Indonesian National Armed Forces), health centers, NGOs, private sectors, and local government, who actively build trust, communicate openly, and commit to the process. However, challenges such as budget limitations, differences in procedures among institutions, and a lack of understanding between the government and the community were also identified. This research provides recommendations for various stakeholders to enhance collaboration effectiveness in the future, including focusing on long-term prevention strategies, improving education and technology usage, strengthening coordination and task distribution, and optimizing the role of local government in disaster mitigation.

Keywords: collaborative governance, challenges, disaster management, landslides, Tegal Regency.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Penelitian Terdahulu	15
2.1.2 Collaborative Governance.....	22
2.1.3 Penanggulangan Bencana	31
2.2 Definisi Konsep.....	32
2.3 Pokok Penelitian.....	34
2.4 Alur Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	37

3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.2.1 Data Primer.....	38
3.2.2 Data Sekunder.....	38
3.3 Informan Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1 Observasi.....	40
3.4.2 Dokumentasi.....	41
3.4.3 Wawancara.....	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
3.5.1 Reduksi Data.....	43
3.5.2 Penyajian Data.....	44
3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	44
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Desa Dermasuci	45
4.2 Pemerintahan Desa Dermasuci.....	49
4.3 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Dermasuci.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Hasil Penelitian.....	54
5.1.1 Proses <i>Collaborative Governance</i>	58
5.1.2 Hambatan dalam Proses <i>Collaborative Governance</i>	83
5.2 Pembahasan	89
5.2.1 Lima Tahapan Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Bergerak Di Desa Dermasuci	92

5.2.2 Hambatan yang Dihadapi oleh Berbagai Pihak Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Bergerak di Desa Dermasuci.....	114
BAB IV PENUTUP.....	129
6.1 Kesimpulan.....	129
6.2 Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kejadian bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci.....	4
Tabel 1.2 Keterlibatan aktor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci.....	7
Tabel 4.1 Topografi Desa, Koordinat dan Ketinggian Letak Kantor Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pangkah.....	48
Tabel 4.3 Perangkat Desa.....	55
Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	114
Tabel 5.2 Anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Instansi.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance menurut Ansell & Gash.....	32
Gambar 2.2 Alur Berpikir.....	42
Gambar 3.1 Alur Analisis Data (Miles dan Huberman, 1994).....	49
Gambar 4.1 Peta Bahaya Multi Bencana Kabupaten Tegal.....	52
Gambar 5.1 Kata yang Sering Muncul dari Data.....	61
Gambar 5.2 Word Tree dari Kata "Bencana"	62
Gambar 5.3 Project Map Tahapan Pelaksanaan Collaborative Governance.....	63
Gambar 5.4 Hasil Koding Wawancara dengan BPBD Bidang Pra bencana.....	59
Gambar 5.5 Hasil Koding Wawancara dengan BPBD Bidang Kejadian Bencana.....	60
Gambar 5.6 Hasil Koding Wawancara dengan BPBD Bidang Pasca Bencana.....	61
Gambar 5.7 Hasil Koding Wawancara dengan Masyarakat Dermasuci.....	62
Gambar 5.8 Hasil Koding Wawancara dengan Sekretaris Desa Dermasuci	63
Gambar 5.8 Hasil Koding Wawancara dengan Sekretaris Desa Dermasuci	64
Gambar 5.10 Hasil Koding Wawancara dengan Disperkim.....	65
Gambar 5.11 Hasil Koding Wawancara dengan Kapolsek Pangkah	66
Gambar 5.12 Hasil Koding Wawancara dengan Puskemas Penusupan.....	67
Gambar 5.13 Hasil Koding Wawancara dengan TIM Satgas Kabupaten Tegal	68
Gambar 5.14 Hasil Koding Wawancara dengan TNI Pangkah	69
Gambar 5.5 Word Tree dari Kata "Kolaborasi".....	83
Gambar 5.6 Project Map Hambatan yang Dihadapi Stakeholders dalam Kolaborasi.....	84
Gambar 5.7 Diagram Hierarkis tentang "Pelaksanaan Collaborative Governance"	90

Gambar 5.15 Sebelum dan Sesudah adanya Penanggulangan dari Berbagai Pihak..... 114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana tanah bergerak yang sering juga disebut tanah longsor atau *landslide* adalah perpindahan massa tanah atau batuan pada lereng akibat pengaruh gravitasi. Menurut Cruden dan Varnes (1996), tanah bergerak didefinisikan sebagai pergerakan massa batuan, debris, atau tanah menuruni lereng. Peristiwa ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas seismik, erosi lereng, dan aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan penggalian tanah. Tanah bergerak dapat terjadi tiba-tiba atau secara perlahan tergantung pada kondisi tanah dan faktor pemicunya. Curah hujan yang tinggi adalah salah satu penyebab utama tanah bergerak karena air yang meresap ke dalam tanah meningkatkan tekanan pori, sehingga mengurangi kohesi tanah dan menyebabkan pergerakan. Aktivitas seismik juga bisa menjadi pemicu, seperti yang diuraikan oleh Schuster dan Highland (2001), di mana getaran gempa bumi melemahkan struktur tanah dan memicu longoran. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti deforestasi dan perubahan penggunaan lahan juga memperburuk kondisi lereng dan meningkatkan risiko tanah bergerak.

Dampak dari bencana tanah bergerak sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Bencana ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta mengakibatkan korban jiwa dan hilangnya tempat tinggal. Penelitian oleh Petley (2012) menunjukkan bahwa di seluruh dunia, tanah bergerak menyebabkan ribuan kematian setiap tahun dan kerugian ekonomi yang signifikan.

Dampak ekologis juga tidak kalah penting, karena tanah bergerak bisa merusak habitat alami dan mengubah aliran sungai, yang selanjutnya mempengaruhi ekosistem setempat.

Isu tanah bergerak sangat relevan untuk dibahas, terutama dalam konteks Indonesia yang rawan bencana alam. Indonesia dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pegunungan dan curah hujan yang tinggi, sangat rentan terhadap bencana tanah bergerak. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020), lebih dari 40% wilayah Indonesia memiliki potensi tanah bergerak tinggi, terutama di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi dan kemiringan lereng yang curam (dalam Imtinan *et al.*, 2024). Dr. Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyatakan bahwa perubahan iklim telah memperparah frekuensi dan intensitas bencana alam termasuk tanah bergerak (bmet.go.id, 2019). Curah hujan yang semakin tidak terduga dan intens menyebabkan peningkatan risiko tanah bergerak, terutama di daerah yang sebelumnya sudah rawan. Hal ini menambah urgensi untuk memahami dan mengelola risiko tanah bergerak secara efektif.

Selain itu, relevansi isu ini juga berkaitan dengan aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bencana tanah bergerak dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Di Indonesia, banyak komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana adalah komunitas yang sudah rentan secara ekonomi. Ketika bencana tanah bergerak terjadi, mereka sering kali tidak memiliki sumber daya untuk pulih dan membangun kembali. Sebagai contoh, penelitian oleh Lassa (2011) menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi dari bencana alam, termasuk tanah bergerak, sering kali memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan di daerah yang terkena dampak.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami bencana tanah bergerak ini adalah Desa Dermasuci yang terletak di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berada di daerah perbukitan dengan ketinggian sekitar 200-500 meter di atas permukaan laut (Oktiawati *et al.*, 2020). Topografinya bervariasi, terdiri dari lereng-lereng curam hingga landai. Keberadaan perbukitan ini membuat Desa Dermasuci rentan terhadap bencana tanah bergerak, terutama pada musim hujan. Iklim Desa Dermasuci termasuk dalam iklim tropis dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari November hingga Maret, dengan curah hujan yang cukup tinggi, mencapai puncaknya pada bulan Desember dan Januari (Oktiawati *et al.*, 2020). Curah hujan yang tinggi ini menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya tanah bergerak di daerah tersebut. Musim kemarau, yang berlangsung dari April hingga Oktober, ditandai dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan panas.

Jenis tanah di Desa Dermasuci bervariasi, namun umumnya adalah tanah lempung dan tanah liat. Tanah lempung memiliki sifat yang mudah menyerap air namun juga mudah jenuh, yang menyebabkan tanah menjadi licin dan tidak stabil saat curah hujan tinggi (Rizal *et al.*, 2022). Kondisi ini semakin memperburuk risiko tanah bergerak. Selain itu, vegetasi di Desa Dermasuci terdiri dari hutan kecil, lahan pertanian, dan perkebunan. Penebangan pohon dan perubahan penggunaan lahan untuk pertanian juga turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan lereng di daerah tersebut.

Tabel 1.1 Kejadian bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci

No	Waktu kejadian bencana	Kerugian
1	Februari 2016	Kerusakan rumah akibat tanah bergerak di wilayah tersebut mencapai 42 rumah (Video Tempo, 2017)
2	Januari 2017	Sejumlah 22 rumah mengalami rusak berat hingga nyaris roboh. Selain itu 55 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Fasilitas umum seperti kantor desa dan musala juga mengalami kerusakan (detik.com, 2017)
3	Februari 2022	Kerusakan Rumah: Sebanyak 97 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Kerusakan Infrastruktur: Selain rumah, pergerakan tanah juga menyebabkan beberapa tiang listrik di kawasan tersebut roboh sehingga aliran listrik terputus (detik.com, 2022)

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Pada bulan Februari 2022, Desa Dermasuci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengalami bencana tanah bergerak yang parah. Sebelumnya bencana tanah bergerak ini juga terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan kerusakan rumah mencapai 42 rumah dan tahun 2017 yang merusak total 77 rumah. Fenomena ini menyebabkan kerusakan signifikan dan memaksa ratusan warga mengungsi. Menurut laporan dari Kompas.com (Wismabrata, 2022), pergerakan tanah telah menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah dan memaksa

lebih dari 296 orang untuk mengungsi. Kepala Desa Dermasuci, Mulyanto, melaporkan bahwa pergerakan tanah terjadi selama sepekan dan wilayah yang terdampak semakin meluas (Wismabrata, 2022). Tanah bergerak terus berlanjut, mengakibatkan retakan pada jalan desa dan kerusakan pada rumah-rumah warga. Sebanyak 97 rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga berat, dan sekitar 200 warga terpaksa mengungsi untuk mencari tempat yang lebih aman (Wismabrata, 2022). Salah satu warga yang terdampak, Siti Aminah (45), menyatakan bahwa ia harus mengungsi ke SDN Dermasuci 01 karena rumahnya mengalami kerusakan berat. Siti mengungkapkan bahwa ia terpaksa mengungsi pada malam hari tanpa sempat membawa pakaian ganti, menunjukkan tingkat kepanikan dan urgensi evakuasi saat peristiwa tanah bergerak terjadi (Wismabrata, 2022).

Fenomena tanah bergerak di Desa Dermasuci menyoroti kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana alam, terutama pada musim hujan dengan curah hujan tinggi yang memicu ketidakstabilan tanah. Langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana yang komprehensif sangat penting untuk mengurangi dampak dan risiko bencana di masa depan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Desa Dermasuci.

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Desa Dermasuci memiliki jumlah penduduk sekitar 4.345 jiwa. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, dengan sekitar 800-900 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini menunjukkan adanya pemukiman yang cukup padat, terutama di area yang relatif datar dan aman dari risiko tanah bergerak. Mayoritas penduduk Desa Dermasuci bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar lahan di desa ini digunakan untuk pertanian, baik lahan sawah

maupun ladang. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai buruh tani atau pekerja di sektor informal lainnya. Kehidupan masyarakat Desa Dermasuci sangat bergantung pada hasil pertanian, sehingga gangguan terhadap lahan pertanian akibat tanah bergerak dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

Desa ini juga memiliki beberapa fasilitas umum seperti sekolah dasar, puskesmas, dan pasar desa. Namun, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, terutama yang berada di daerah rawan tanah bergerak. Kerusakan infrastruktur akibat tanah bergerak seringkali menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat desa, yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Meskipun beberapa penanganan telah dilakukan, namun implementasinya masih belum dapat dikatakan optimal. Penanganan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci menunjukkan beberapa kelemahan signifikan. Meskipun BPBD telah dibentuk di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah, hanya sedikit daerah yang berkomitmen untuk menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi pengurangan risiko bencana. Sudaryanto (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah (28 daerah) belum menetapkan kebijakan ini, menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan strategis jangka panjang untuk pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Selain itu, tidak ada kebijakan yang jelas untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana bagi ASN BPBD. Semua kabupaten dan kota belum menyelenggarakan pelatihan semacam itu. BPBD se-Jawa Tengah belum pernah mengadakan kegiatan pelatihan

pengurangan risiko bencana bagi ASN BPBD, dan untuk pengembangan kompetensi ASN, BPBD hanya berperan sebagai instansi pengirim (Sudaryanto, 2021). Ini menunjukkan kurangnya persiapan dan peningkatan kapasitas internal dalam penanganan bencana.

Kemudian tidak ada analisis atau rumusan tentang efektivitas penyelenggaraan pelatihan pengurangan risiko bencana karena seluruh daerah belum pernah mengadakan pelatihan tersebut (Sudaryanto, 2021). Hal tersebut menunjukkan kurangnya evaluasi dan penilaian terhadap program pelatihan yang ada, yang sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, peran dan kompetensi dalam meningkatkan kapasitas ASN BPBD menjadi sangat penting, namun fokus masalah penelitian tentang pengurangan risiko bencana melalui pengembangan kompetensi ASN BPBD di Jawa Tengah tidak dapat dirumuskan secara jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi yang memadai (Sudaryanto, 2021).

Tabel 1.2 Keterlibatan aktor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci

No	Aktor/ Stakeholder	Jenis keterlibatan dalam penanggulangan bencana
1.	PEMROV JATENG (Badan Pembangunan Daerah Tegal, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dukungan kebijakan dan anggaran. 2. Koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. 3. Melaksanakan program mitigasi bencana di tingkat provinsi.
2.	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian risiko dan koordinasi penanggulangan bencana. 2. Menyusun rencana tanggap darurat dan pelatihan masyarakat.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan bantuan logistik dan teknis selama bencana. 4. Koordinasi penanganan darurat dan evakuasi warga.
3.	LSM LH (Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan penyuluhan tentang konservasi lingkungan. 2. Membantu dalam program rehabilitasi dan reboisasi daerah rawan bencana. 3. Pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang mitigasi bencana.
4.	PEMDES/DESTANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi warga tentang bahaya tanah bergerak. 2. Penyediaan data dan informasi tentang kondisi lokal. 3. Menyusun dan melaksanakan rencana tanggap darurat di tingkat desa. 4. Koordinasi evakuasi dan bantuan langsung ke warga terdampak.
5.	PMI (Palang Merah Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bantuan medis dan dukungan kesehatan. 2. Pelayanan darurat pertama dan evakuasi korban. 3. Distribusi bantuan logistik seperti makanan, air, dan obat-obatan. 4. Edukasi dan pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat.
6.	PRAMUKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relawan dalam penanggulangan bencana. 2. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana. 3. Mendukung kegiatan logistik dan distribusi bantuan.
7.	TNI/POLRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam evakuasi dan pengamanan daerah bencana. 2. Dukungan logistik dan distribusi bantuan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Konstruksi darurat dan pembersihan area terdampak. 4. Menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penanggulangan bencana.
8.	DISPERKIM (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pembangunan infrastruktur relokasi. 2. Merancang dan melaksanakan program pembangunan perumahan tahan bencana. 3. Penataan kawasan permukiman agar lebih aman dari bencana.
9.	RS/PUSKESMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan layanan kesehatan darurat bagi korban bencana. 2. Pelayanan medis lanjutan dan rehabilitasi korban. 3. Penyuluhan kesehatan dan sanitasi untuk menghindari penyakit pasca bencana. 4. Pemantauan kesehatan masyarakat selama dan setelah bencana.
10.	TIM SAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pencarian dan Penyelamatan Korban. 2. Melakukan Penanganan Medis Darurat 3. Melakukan Distribusi Bantuan dan Logistik. 4. Mengatur Evakuasi 5. Koordinasi dengan Pihak Terkait 6. Pengumpulan Data Lapangan
11.	LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan logistik 2. Melakukan penggalangan donasi
12.	CV Bintang Paseduluran 58 Mapan (Swasta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendanaan dan bantuan infrastruktur 2. Melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, telah terlibat dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci. Pemerintah Kabupaten Tegal, misalnya, menyiapkan relokasi bagi pengungsi dan memantau kebutuhan logistik di tempat pengungsian (Setiadi, 2022). Disperakim Jateng juga aktif dalam koordinasi dan verifikasi kerusakan rumah serta sosialisasi program bantuan pasca bencana (Disperakim Jateng, 2022). Namun, keterlibatan ini masih terhambat oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sistematis untuk ASN BPBD. Masyarakat Desa Dermasuci terlibat dalam penanggulangan bencana melalui gotong royong dan kerja sama dalam menghadapi dampak bencana. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam upaya evakuasi dan adaptasi terhadap kondisi darurat. Namun, kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang sistematis dari pemerintah membuat masyarakat mungkin tidak sepenuhnya siap menghadapi bencana.

Berdasarkan pemaparan terkait kondisi Desa Dermasuci, fenomena bencana tanah bergerak, serta bagaimana penanggulangan bencananya sejauh ini yang masih belum optimal, menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan pihak swasta, karena permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah, namun juga membutuhkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dikaji melalui *collaborative governance*, *collaborative governance* adalah pendekatan di mana berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui proses yang partisipatif dan transparan (Hardi, 2020). Menurut Emerson, Nabatchi, Balogh (2012), *collaborative governance* melibatkan struktur dan proses di mana lembaga-lembaga publik bekerja

bersama dengan aktor non-pemerintah untuk merancang, mengatur, dan melaksanakan kebijakan publik atau program tertentu. Prinsip-prinsip dasar collaborative governance meliputi keterbukaan, partisipasi aktif, berbagi kekuasaan dan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Pendekatan collaborative governance sangat relevan dan potensial untuk penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci (Suprito, 2022). Bencana tanah bergerak memerlukan respons yang cepat, koordinasi yang baik, dan keterlibatan berbagai pihak untuk mitigasi yang efektif. Collaborative governance memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja bersama dalam mengatasi bencana, berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian untuk meminimalkan dampak dan risiko bencana. Dalam konteks penanggulangan bencana, pendekatan ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mitigasi bencana, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan yang diambil. Penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi pendekatan collaborative governance dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci (Tim Detik Jateng, 2024). Dengan memahami bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat diterapkan dan dimaksimalkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan strategi mitigasi bencana yang lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN BPBD dalam menghadapi bencana tanah bergerak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada

peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan bencana. Berdasarkan pemaparan di atas, judul dari penelitian ini adalah “***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH BERGERAK DI DESA DERMASUCI, KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta dalam proses pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta dalam proses pelaksanaan collaborative governance dalam upaya

penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori collaborative governance, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana alam. Dengan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam situasi nyata di Desa Dermasuci, penelitian ini menambah pemahaman tentang dinamika, efektivitas, dan hambatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model konseptual yang lebih komprehensif dan menjadi referensi penting dalam literatur akademik mengenai manajemen risiko bencana dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Bagi pembaca, terutama praktisi di bidang penanggulangan bencana dan pemerintah daerah, penelitian ini menyediakan wawasan tentang strategi efektif dalam pelaksanaan collaborative governance serta solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul. Ini dapat membantu mereka dalam merancang kebijakan dan program yang lebih baik untuk mengelola risiko bencana. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait implementasi dan pengembangan collaborative governance di berbagai konteks bencana, membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dan inovasi dalam manajemen bencana.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa umpan balik berkelanjutan bagi pemerintah dan aktor terkait dalam penerapan *collaborative governance* untuk penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci. Melalui evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi antar stakeholder, hasil penelitian ini diharap dapat menjadi dasar untuk memperbaiki serta memperkuat kebijakan dan program yang telah berjalan. Dengan mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam kerjasama, pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan kapasitas manajemen risiko bencana secara berkelanjutan, sehingga sinergi yang tercipta mampu meminimalkan dampak bencana sekaligus membangun ketangguhan komunitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, sehingga masyarakat lebih siap dan proaktif menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang relevan dengan topik atau bidang penelitian yang sedang dibahas. Bagian ini dalam suatu laporan atau artikel penelitian berfungsi untuk memberikan konteks, menunjukkan perkembangan yang sudah dicapai dalam bidang tersebut, dan mengidentifikasi celah atau area yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Secara keseluruhan, bagian penelitian terdahulu adalah elemen kritis dari setiap karya ilmiah karena membantu meletakkan dasar bagi penelitian baru, menunjukkan bagaimana penelitian tersebut berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada, dan mengarahkan fokus pada area yang paling membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Alyaa Larasati Hasna dan Awang Darumurti, "Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan" (Hasna and Darumurti, 2023)	Kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini merujuk pada Teori Edward Deseve yang menyajikan 8 indikator untuk mengukur kesuksesan collaborative governance yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, tata kelola, akses ke otoritas, akuntabilitas distributif, berbagi informasi, dan akses ke sumber daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk collaborative governance yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan dalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, dan pembangunan MCK Adaptif di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program-program ini telah berhasil mengurangi risiko yang disebabkan oleh banjir rob. Namun, keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitiannya, yaitu pada penelitian ini menganalisis tentang mitigasi atau pra bencana, namun pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada analisis penanggulangan atau setelah terjadinya bencana. Kemudian bencana alam yang diteliti juga berbeda, pada penelitian ini adalah banjir, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah bencana tanah bergerak atau longsor.

			program mitigasi banjir rob belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan.	
2.	Sindi Puspita, Junadi, dan Septi Wulandari “Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bojonegoro” (Puspita and Junadi, 2024)	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan enam subjek penelitian	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa collaborative governance dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro belum mencapai tingkat optimal dan efektivitas penuh, meskipun beberapa indikator telah terpenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu dan berbagi informasi yang telah terjalin. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yang menghambat keberhasilan kolaborasi, seperti dialog tatap muka yang belum berjalan intens, kurang aktifnya peran berbagai aktor dalam kolaborasi, serta sumber daya yang masih kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada BPBD Kabupaten Bojonegoro sebagai koordinator penanggulangan bencana untuk melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran sektor swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen, serta	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitiannya, yaitu pada penelitian ini menganalisis tentang mitigasi atau pra bencana, namun pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada analisis penanggulangan atau setelah terjadinya bencana.

			meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.	
3.	Teddy Rusmawan, Supardi Hamid, Joko Santoso “Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga” (Rusmawan et al., 2023)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah purposive sampling.	Hasil penelitian ini mencakup beberapa aspek, termasuk kondisi awal dalam pelaksanaan collaborative governance dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah yang terindikasi rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Komunikasi yang terjalin dalam masyarakat mulai dari tingkat pemerintah desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten. Forum koordinasi yang digunakan adalah kelompok tanggap bencana yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan, salah satunya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Proses collaborative governance ini berhasil berjalan sesuai dengan rencana, sehingga pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya mampu menggerakkan kelompok tanggap bencana. Selain itu, proses ini meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya bencana alam, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan mitigasi, antisipasi, dan kesiapsiagaan sebagai	Penelitian ini tidak mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses collaborative governance, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan juga akan mengkaji hambatan karena hal ini juga mempengaruhi kinerja dari collaborative governance..

			bagian dari upaya perlindungan dan penanggulangan bencana alam.	
4.	Aziz Masyhuri, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati, Budi Puspo Priyad “Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang” (Masyhuri et al., 2021)	Berdasarkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Gajahmungkur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data didasarkan pada empat indikator collaborative governance, yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, hingga proses kolaboratif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi, yaitu pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan juga sektor swasta. Namun, dalam prosesnya, koordinasi yang dilakukan oleh ketiga pemangku kepentingan tersebut kurang efektif, sehingga menghambat kegiatan manajemen bencana. Akibat dari kurangnya koordinasi ini, bencana tanah longsor di Kota Semarang belum tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif yang dilakukan dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan di luar sektor pemerintah, menyebabkan tanah longsor masih sering terjadi.	Perbedaan terletak pada teknik analisis data yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Spradley, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.
5.	Nurlaila dan Masud “Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini dipilih	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan manajemen prabencana di Kabupaten Bima dilakukan melalui	Penelitian ini tidak mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses collaborative

	<p>Dalam Perspektif Collaborative Governance” (Nurlaila, 2023)</p>	<p>melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>pendekatan collaborative governance dengan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, seluruh elemen terlibat sebagai manifestasi partisipatif yang demokratis dalam upaya penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana berperan sebagai sektor utama yang berupaya mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dengan kerjasama lintas sektoral. Dalam penerapannya, BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, serta pelaksana program-program tersebut. Melalui kolaborasi ini, dihasilkan strategi penanggulangan bencana dengan memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana. Proses kerjasama ini juga telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam rencana strategis dan rencana kerja</p>	<p>governance, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan juga akan mengkaji hambatan karena hal ini juga mempengaruhi kinerja dari collaborative governance.</p> <p>Selain itu, penelitian ini juga mengkaji manajemen prabencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji penanggulangan pasca bencana.</p>
--	--	--	--	--

			<p>tahunan seluruh SKPD. Pemerintah Daerah juga bermitra dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan hasil-hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah, individu, dan keluarga seperti pembangunan rumah tahan gempa, sumur resapan, dan lainnya. Diharapkan dengan adanya berbagai riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat mengurangi kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan pemaparan lima penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan adanya gap atau celah untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada proses collaborative governance dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kabupaten Tegal. Peneliti akan menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta seperti LSM atau lembaga lainnya, serta masyarakat dalam menghadapi pasca bencana tersebut yang telah terjadi beberapa kali. Selain itu, peneliti menyadari bahwa dalam prosesnya tentu akan menghadapi hambatan-hambatan, oleh karena itu penelitian ini juga akan menelisik apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh setiap pihak dalam upaya penanggulangan tersebut. Mengetahui hambatan dapat menjadi pengetahuan yang bagus karena sebagai referensi untuk mengidentifikasi apa saja hal-hal yang perlu diantisipasi dan diperbaiki ke depannya.

2.1.2 Collaborative Governance

A. Pengertian Collaborative Governance

Definisi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008) adalah suatu bentuk pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung berinteraksi dengan pemangku kepentingan non-negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan diarahkan pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, atau dalam manajemen program atau aset publik. Konsep ini banyak dijadikan acuan oleh para akademisi lainnya hingga Emerson *et al.* (2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat

secara konstruktif antar badan publik, berbagai level pemerintahan, dan sektor publik, privat, serta sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali melalui forum bersama. Kolaborasi ini membahas mengenai kerjasama dua atau lebih pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya bersama yang sulit dicapai jika dilakukan secara individual.

Kolaborasi, secara fundamental, merupakan kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial adalah hubungan antara simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Dari pemahaman ini, teori kolaborasi dapat disimpulkan sebagai analisis dari proses tata kelola dengan fokus pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mewajibkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam dialog, di mana mereka mewakili diri sendiri untuk mengungkapkan kepentingan mereka (Booher dan Innes, 2002).

Fokus collaborative governance terletak pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, dan tujuan serta proses kolaborasi adalah mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan. Collaborative governance berupaya untuk mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (2000) (Sudarmo, 2015), kolaborasi adalah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang sulit dipecahkan oleh sebuah organisasi secara individu. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015), yang mendefinisikan kolaborasi sebagai aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan "nilai publik" dibandingkan dengan bekerja secara independen.

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan "non-state" dalam proses pembuatan kebijakan yang formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

Menurut Agranoff & McGuire (2009), collaborative governance secara khusus menekankan kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara peserta multisektor, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, sehingga membutuhkan interaksi antar berbagai organisasi yang terkait dalam kegiatan publik. Kolaborasi ini memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi permintaan yang meningkat dari pengelolaan lintas pemerintahan, organisasi, dan batas sektoral.

Bingham mendefinisikan collaborative sebagai bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melintasi batas-batas dalam hubungan multisektor dan multifaktor. Bingham menggambarkan makna kolaboratif sebagai melibatkan beberapa aktor yang saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu, dengan aktor-aktor ini bekerja dalam beberapa sektor. Sedangkan governance adalah sistem pemerintahan. Maka dari itu, collaborative governance adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan pihak negara dan non-negara yang bekerja dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010).

Dari berbagai pengertian tentang collaborative governance, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar pemangku kepentingan. Collaborative governance dapat dijelaskan

sebagai proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor pemerintahan. Melalui perspektif collaborative governance, tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan, 2017).

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal): Pada tahap ini, dalam relasi antar pemangku kepentingan, setiap aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.
2. Kepemimpinan Fasilitatif: Ryan dalam Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:
 - a. Manajemen yang baik terhadap proses kolaborasi;
 - b. Pengelolaan kemampuan dalam melaksanakan kredibilitas teknis;
 - c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.
3. Desain Institusional (*Institutional Design*): Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi, dengan penekanan pada legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.
4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*): Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu penentuan masalah, penentuan tujuan, dan implementasi. Tahapan pembentukan kolaboratif meliputi:
 - a. Dialog tatap muka (*Face to face*)

Keseluruhan collaborative governance terbangun atas dasar adanya "dialog antara para pemangku kepentingan". Proses dialog ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan. Biasanya, dialog antara pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan menekankan pada narasi bahwa kolaborasi akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Proses membangun kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari dialog. Pemimpin kolaborasi harus memiliki keterampilan untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ini merupakan proses jangka panjang yang memerlukan waktu dan komitmen yang besar.

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Kondisi saling ketergantungan yang tinggi antara pemangku kepentingan cenderung meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi bukanlah sekadar kesepakatan satu kali, melainkan proses kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

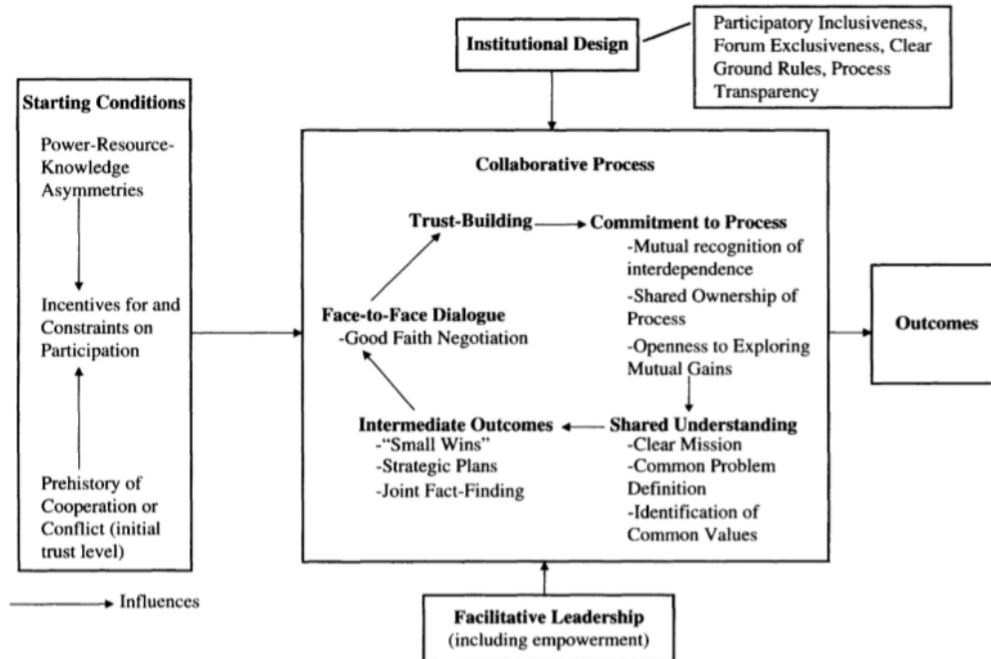
d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Pada tahap tertentu, pemangku kepentingan harus dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Ini mencakup tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang jelas, dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai melalui kolaborasi.

e. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi cenderung berlanjut ketika hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, meskipun masih dalam bentuk hasil

antara. Kemenangan kecil ini dapat menjadi pemicu untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.



Gambar 2.1 Model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash

Sumber: *Model of Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2008)

B. Hambatan *Collaborative Governance*

Terdapat tiga jenis hambatan yang kompleks yang biasanya dihadapi oleh collaborative governance, yaitu hambatan dalam pemecahan masalah yang substantif, hambatan dalam proses berkolaborasi, dan hambatan akuntabilitas multi-relasional (Waardenburg et al., 2020).

1. Dalam pemecahan masalah, collaborative governance yang berfokus pada isu spesifik seperti "tindakan kejahatan" memulainya dengan mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebabnya (Waardenburg et al., 2020). Identifikasi masalah semacam ini sulit

karena kompleksitasnya dan sulit disepakati mengenai permasalahan serta solusi yang diambil (Head dan Alford, 2015). Proses pemecahan masalah seringkali menyerupai "tawar-menawar" antara pihak-pihak yang berkolaborasi (Basadur *et al.*, 2000), tetapi hal ini diperlukan untuk menemukan solusi inovatif (Sørensen & Torfing, 2011). Setelah masalah diidentifikasi, penting bagi kolaborator untuk mengembangkan perubahan yang dapat diterima dan dilaksanakan (Poister, 2003; Sparrow, 2008), dengan memperhatikan evaluasi terhadap hasil yang diinginkan (P. Rogers *et al.*, 2004).

2. Dalam proses berkolaborasi, langkah awalnya adalah mencapai pemahaman bersama tentang tujuan dan pendekatan yang akan digunakan (Ansell dan Gash, 2008; Emerson *et al.*, 2012). Terkadang terdapat kepentingan yang saling bertentangan, dan hambatannya adalah mengubah konflik negatif menjadi konstruktif (Crosby *et al.*, 2017). Kepercayaan antara kolaborator menjadi kunci, dan harus dibangun melalui keterlibatan semua pihak (Ring & Van de Ven, 1994; Emerson *et al.* 2012). Pembentukan komitmen bersama juga penting (Ansell dan Gash, 2008; Bryson *et al.*, 2015).
3. Hambatan terakhir adalah akuntabilitas multi-relasional, di mana kolaborasi harus bertanggung jawab kepada pihak "luar" serta mendapatkan dukungan dari masyarakat luas (Gains & Stoker, 2009; Klijn, E & Koppenjan, J, F, 2000). Kolaborasi ini juga harus memastikan legitimasi secara demokratis (Heinrich, 2002; Moynihan *et al.*, 2011; E. Rogers & Weber, 2010).

C. Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Dalam collaborative governance, terdapat sejumlah kriteria yang dapat menghambat proses kolaborasi. Memahami hal ini sangat penting untuk menilai apakah praktik collaborative governance berhasil atau gagal dalam penerapannya. Implementasi kolaborasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Menurut Government of Canada, hambatan terhadap kolaborasi dan partisipasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik (Government of Canada, 2008). Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Budaya

Kolaborasi dapat gagal karena kecenderungan budaya yang bergantung pada prosedur dan kurangnya keberanian untuk mengambil risiko dan terobosan. Menciptakan kolaborasi yang efektif membutuhkan para pegawai publik dan pemimpinnya untuk memiliki keterampilan serta kemauan untuk terlibat dalam kemitraan pragmatis yang berorientasi hasil. Meskipun memungkinkan untuk mengabaikan konvensi demi melakukan kolaborasi, namun dalam pelayanan publik yang sangat bergantung pada prosedur dan enggan mengambil risiko, kolaborasi sering kali sulit diwujudkan.

Ketergantungan yang berlebihan pada prosedur justru akan menghambat kolaborasi dan tidak meningkatkan kualitasnya. Hambatan ini juga muncul karena konsep top-down yang masih dipertahankan oleh pemerintah dalam menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Dominasi pemerintah dan tidak dilaksanakannya kesepakatan berdasarkan mentalitas kerja sama dan egalitarian juga menghambat efektivitas kolaborasi.

Selain itu, partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya sering kali tidak dianggap penting dan didominasi oleh pemerintah melalui pendekatan top-down.

Strategi pecah belah dengan mengakomodasi kepentingan kelompok pro-pemerintah dan mengabaikan kelompok anti-pemerintah juga dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terhambat oleh kecenderungan institusi yang terlibat dalam kerja sama (terutama pemerintah) untuk menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi lain yang terlibat. Institusi yang terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, dengan akuntabilitas dan arah kebijakan yang bersifat vertikal, tidak cocok untuk kolaborasi yang membutuhkan cara kerja horizontal antara pemerintah dan nonpemerintah.

Bahkan, meskipun sebuah pemerintahan mengadopsi sistem demokrasi representatif, hal ini belum tentu cocok untuk kolaborasi karena demokrasi membutuhkan proses dan formalisme yang tinggi dibandingkan dengan kemitraan horizontal. Kolaborasi yang cenderung spontan dan tidak memerlukan aturan ketat formal seringkali tidak cocok dengan prosedur tradisional atau SOP yang biasa digunakan dalam organisasi publik yang mekanistik. Akuntabilitas institusi publik yang kaku, hanya mengacu pada organisasi atau atasan, lebih menekankan pada responsibilitas daripada fleksibilitas yang dibutuhkan dalam kolaborasi.

3. Faktor Politik

Kolaborasi dapat terhambat oleh kurangnya inovasi dalam kepemimpinan untuk mencapai tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif adalah pemimpin yang mampu memperkenalkan berbagai nilai dan tujuan yang menjadi inti dari pemerintahan kolaboratif serta menginspirasi agenda yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang positif. Kolaborasi dapat terhambat jika pemimpin kelompok yang berkolaborasi kurang inovatif dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik.

Selain itu, perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi. Ketika kesepakatan yang telah disetujui di awal berubah dan muncul kepentingan baru yang berbeda di antara pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin masing-masing kelompok, kolaborasi menjadi sulit untuk dilanjutkan.

2.1.3 Penanggulangan Bencana

Menurut United Nations Development Program (UNDP) (dalam Soehatman Ramli, 2010), bencana adalah suatu kejadian ekstrem di lingkungan alam atau manusia yang secara negatif mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda, atau aktivitas hingga menimbulkan bencana. Sementara menurut NFPA 1600 (dalam Soehatman Ramli, 2010), bencana adalah peristiwa di mana sumber daya, baik personal maupun material, yang tersedia di daerah tersebut tidak mampu mengendalikan kejadian luar biasa yang mengancam nyawa atau sumber daya fisik dan lingkungan. Bencana dapat mengganggu fungsi suatu masyarakat secara serius, menyebabkan kerugian luas dalam kehidupan manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan, yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri (ISDR, 2004). Dengan demikian, bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar dalam hal manusia, material, ekonomi, dan lingkungan, melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya menggunakan sumber daya mereka sendiri (ADRRN, 2009). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia,

sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses, perbuatan, dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana, menurut UU RI No. 24/2007, adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penanganan bencana didasarkan pada keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, sehingga pengertian ini menegaskan bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerjasama antarinstansi. Sebagai sistem kerjasama, ini memungkinkan penanganan bersama untuk proyek tertentu secara langsung, maupun secara parsial atau tidak langsung, di mana masing-masing pihak saling melengkapi dalam menghadapi fenomena atau bencana yang terjadi di suatu daerah.

2.2 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah penjelasan abstrak mengenai hal-hal yang perlu diamati untuk mempermudah penelaahan dan pemahaman masalah, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. Dengan demikian, definisi konsep menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian. Konsep berfungsi sebagai unsur investigasi yang didefinisikan untuk menggambarkan fenomena sosial secara umum dan abstrak. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menguraikan definisi konsep sebagai berikut:

A. Proses *Collaborative Governance*

Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*): Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu penentuan masalah, penentuan tujuan, dan implementasi. Tahapan pembentukan kolaboratif meliputi:

1. Dialog tatap muka (*Face to face*)

Keseluruhan collaborative governance terbangun atas dasar adanya "dialog antara para pemangku kepentingan". Proses dialog ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan. Biasanya, dialog antara pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan menekankan pada narasi bahwa kolaborasi akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Proses membangun kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari dialog. Pemimpin kolaborasi harus memiliki keterampilan untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ini merupakan proses jangka panjang yang memerlukan waktu dan komitmen yang besar.

3. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Kondisi saling ketergantungan yang tinggi antara pemangku kepentingan cenderung meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi bukanlah sekadar kesepakatan satu kali, melainkan proses kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Pada tahap tertentu, pemangku kepentingan harus dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Ini mencakup tujuan

bersama yang jelas, definisi masalah yang jelas, dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai melalui kolaborasi.

5. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi cenderung berlanjut ketika hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, meskipun masih dalam bentuk hasil antara. Kemenangan kecil ini dapat menjadi pemicu untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

B. Penanggulangan Bencana Tanah Bergerak

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam penelitian ini difokuskan pada penanggulangan bencana alam tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kabupaten Tegal. Tanah bergerak atau longsor adalah fenomena geologi yang melibatkan pergerakan massa tanah secara tiba-tiba atau bertahap, yang dapat menyebabkan perubahan besar pada permukaan tanah dan lingkungan sekitarnya. Pergerakan ini biasanya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor alam seperti curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas vulkanik, serta faktor antropogenik seperti aktivitas manusia yang mengubah struktur tanah.

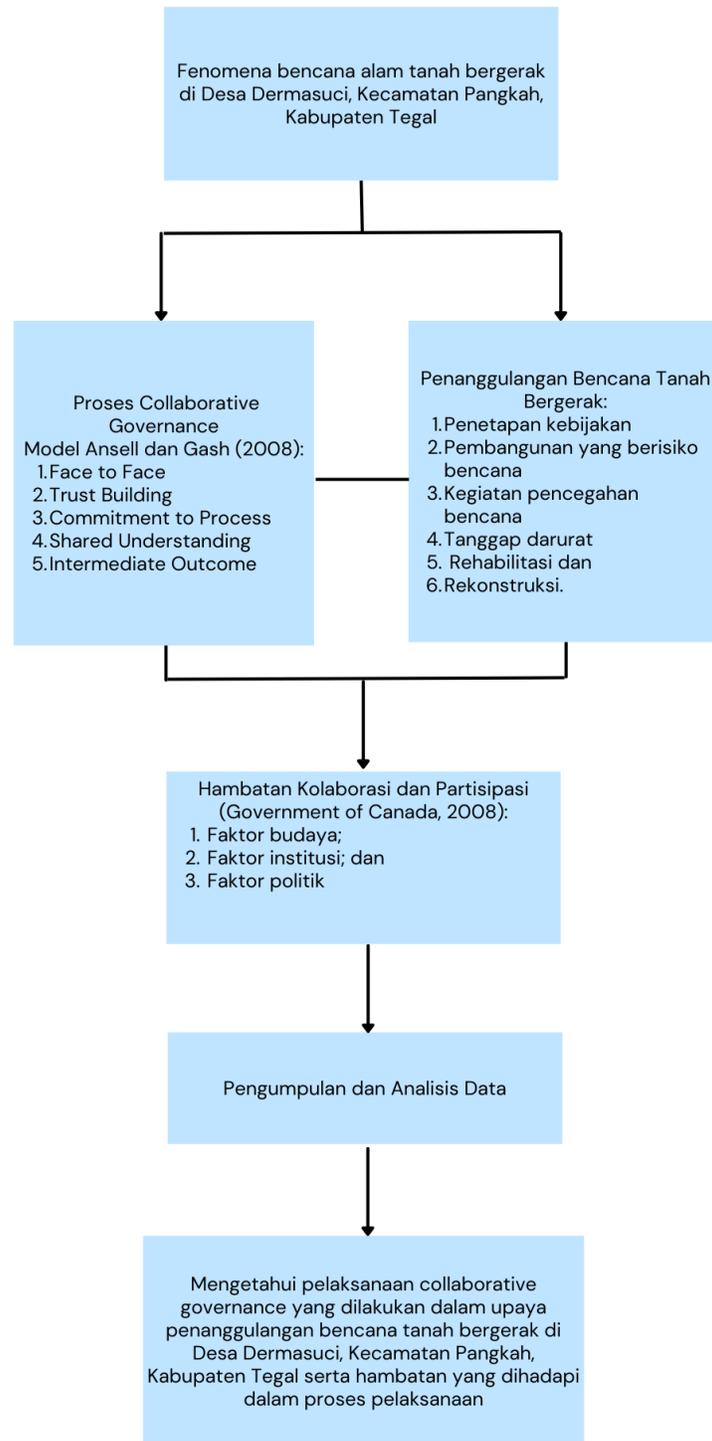
2.3 Pokok Penelitian

Adapun pokok penelitian ini mencakup beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal di mana collaborative governance melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani bencana.
- b. Model analisis yang digunakan adalah Model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan fokus pada *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.
- c. Faktor hambatan yang dianalisis adalah faktor budaya, politik, dan institusi.
- d. Objek kajian penelitian ini mencakup kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi
- e. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.4 Alur Pikir

Alur Pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Alur pikir mengenai Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Bergerak Di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Alur Berpikir
 Sumber: (diolah oleh peneliti, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan detail suatu objek atau fenomena yang akan diuraikan secara naratif. Data dan fakta yang dikumpulkan akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau gambaran, bukan dalam bentuk angka. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga melibatkan penggunaan kutipan data yang diungkapkan langsung dari lapangan untuk memberikan dukungan terhadap argumen yang disajikan dalam laporan. Menurut Moleong (1989), penelitian kualitatif berakar pada kebutuhan manusia akan pemahaman yang mendalam, menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses daripada hasil, dan membatasi studi dengan fokus yang jelas. Desain penelitian kualitatif bersifat sementara dan hasilnya didiskusikan dan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan naratif tentang pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan bencana alam tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dengan lebih luas, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena yang diamati. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau kegiatan, baik pada

tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Studi kasus bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan fokus pada data faktual, tanpa manipulasi.

Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan bencana alam tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana collaborative governance dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi bencana alam tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan informasi langsung dari informan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Proses pencatatan data dari sumber utama melibatkan partisipasi aktif penulis dalam kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Pencatatan data dari sumber primer dilakukan secara hati-hati dan sistematis, dengan mencatat semua informasi relevan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat diandalkan dalam proses analisis dan interpretasi selanjutnya.

3.2.2 Data Sekunder

Sumber sekunder adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan disampaikan melalui perantara seperti individu lain atau dokumen tertulis (Sugiyono, 2013). Jenis sumber data sekunder ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Meskipun data sekunder ini sering dianggap sebagai pendukung, namun tetap memiliki nilai penting dalam upaya pengumpulan data penelitian untuk memastikan keberagaman dan validitas informasi yang diperoleh.

Terdapat beberapa contoh sumber data sekunder yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, berita, serta dokumen pribadi yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, berita dan hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Tegal. Melalui pemanfaatan berbagai sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mendukung analisis dalam penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai, informan memainkan peran kunci, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal
- 2) Kepala Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal
- 3) LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia

- 4) Polisi
- 5) TNI
- 6) Puskesmas
- 7) Palang Merah Indonesia (PMI)
- 8) TIM SAR
- 9) DISPERKIM (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- 10) Masyarakat terdampak Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal
- 11) Swasta CV Bintang Paseduluran 58 Mapan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, penting bagi data yang diperoleh untuk memiliki kedalaman, kejelasan, dan spesifikasi yang tinggi. Sugiyono (2008) menunjukkan bahwa data bisa diperoleh melalui beragam teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi atau triangulasi dari teknik-teknik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis yang penting, di antaranya proses pengamatan dan ingatan Sutrisno

(1986) sebagaimana dikutip dalam (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar. Pelaksanaan observasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi berperan serta (participant observation) dan observasi non partisipan (non participant observation) (Sugiyono, 2013).

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan dokumen yang diperoleh langsung dari akun pemerintah Kabupaten Tegal buku-buku, artikel dari internet, surat kabar, majalah, jurnal, serta sumber bacaan lain yang mendukung penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalah representasi dari berbagai arsip yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen seperti otobiografi, catatan harian, buku, foto, dan sebagainya sebagai pelengkap dalam proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti (Mulyana, 2010). Data dari dokumentasi dihimpun dengan mengidentifikasi sumber dokumen yang relevan buku, artikel internet, surat kabar, majalah, dan jurnal yang mendukung penelitian. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dievaluasi kualitasnya, dikelompokkan berdasarkan tema, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu yang muncul, serta untuk mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian.

3.4.3 Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan respons dari narasumber dicatat atau direkam menggunakan alat perekam suara (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya serta alat perekam suara untuk mencatat

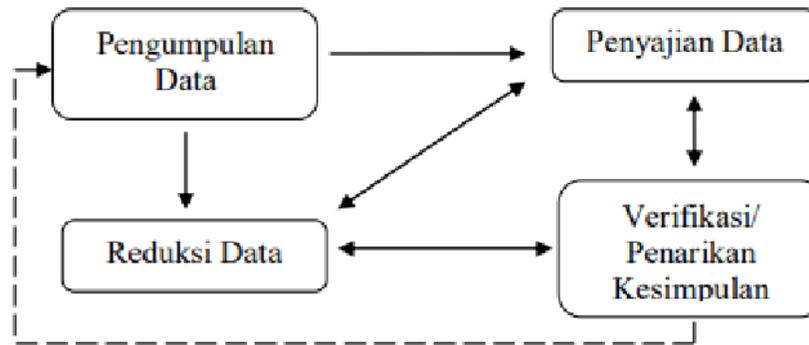
tanggapan narasumber. Maksud dari proses wawancara adalah untuk memperoleh data yang terpercaya dan akurat dari narasumber yang telah dipilih, dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data secara efektif. Peneliti menjalankan wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah dipilih.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Peneliti tidak menyusun pertanyaan secara mendetail sebelum wawancara dilakukan, namun mengajukan pertanyaan yang umum dan mengembangkannya lebih lanjut selama atau setelah wawancara, sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2013), analisis data adalah suatu proses yang mencakup pencarian dan pengaturan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya dengan cara yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyusun data tersebut secara teratur agar lebih mudah dimengerti dan disampaikan kepada pihak lain. Proses analisis data mencakup pengorganisasian data, pembagian data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan, identifikasi pola, seleksi informasi penting, dan pembuatan kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, serta setelah penyelesaian tahap pengumpulan data dalam suatu periode tertentu (Sugiyono, 2013). Miles dan Huberman (1994) (sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, 2008) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara kolaboratif dan

berkelanjutan hingga data yang diperoleh telah mencapai tingkat kejenuhan. Mereka membagi kegiatan analisis data menjadi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 3.1 Alur Analisis Data (Miles dan Huberman, 1994)

Sumber: (Sugiyono, 2013)

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*), mengacu pada rangkuman data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan. Reduksi data melibatkan penjelasan yang teliti dan rinci serta pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Data yang telah direduksi memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah langkah-langkah pengumpulan data berikutnya. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti wawancara mendalam dengan admin dan pengikut akun Instagram @bijakmemilih.id, serta interaksi pengikut pada akun tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mencari tema serta pola yang muncul.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, dan flowchart. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali menggunakan teks naratif sebagai bentuk yang paling umum dan mudah dipahami.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

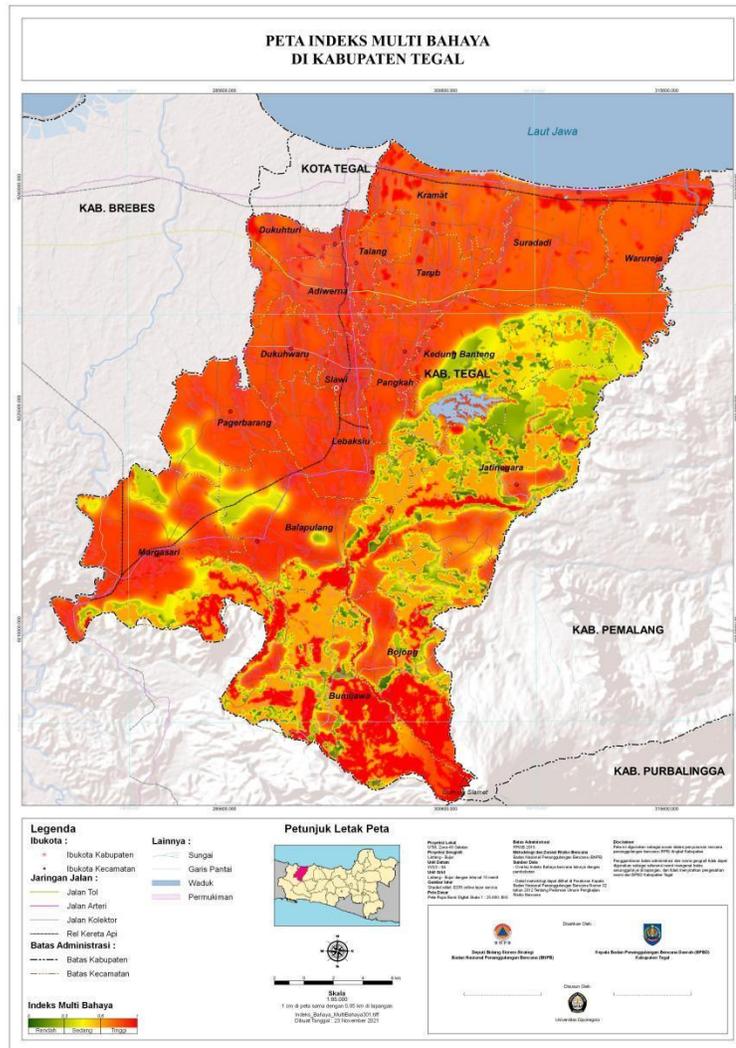
Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Langkah ini melibatkan penyimpulan awal yang sementara dan verifikasi berkelanjutan. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal masih bisa berubah seiring dengan proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan valid.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Dermasuci

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Morfologi wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan bervariasi antara tipe datar 0-20 tipe bergelombang 2-150, tipe curam/berbukit 15-400 dan tipe sangat curam >400. Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Tegal rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan lain sebagainya, yang bisa dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Peta Bahaya Multi Bencana Kabupaten Tegal

Sumber: <https://titir.tegalkab.go.id/cari-data>, 2024

Jenis tanah dengan karakteristik dan sifat dengan angka pelapukan batuan yang sangat tinggi dengan komposisi tanah didominasi material lepas dan berlapis, maka tanah mudah longsor. Kerawanan bencana alam tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Tegal seluas 15.011, 29 ha (15,30%) terinci atas Kecamatan Balapulang (3.601,34 ha), Bojong (1.864, 83 ha), Bumijawa (3.841, 03 ha), Jatinegara (2.258, 77 ha), Kedungbanteng Desa Penujah (393,73 ha), Lebaksu (1.192,78 ha), Margasari (726, 68 ha)

dan Pangkah (1.132, 13 ha) (SIPD Kabupaten Tegal, 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS (nilai kuantitatif dari parameter-parameter yang ada pada Daerah Aliran Sungai) dan kondisi drainase kawasan Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794, 86 ha (21, 19%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (1.405, 93 ha), Balapulung (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa Desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhturi (1.674, 93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara Desa Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha) (SIPD Kabupaten Tegal, 2014).

Desa Dermasuci termasuk dalam wilayah Kecamatan Pangkah. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif yang cukup strategis karena berada di dekat jalur penghubung antar-desa di Kecamatan Pangkah. Adapun batas wilayah Desa Dermasuci: sebelah utara berbatasan dengan Desa Kajen dan Desa Balamoa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuhjati Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesarean, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebeteng (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023). Letaknya yang berada di dataran rendah, dengan ketinggian sekitar 30-50 meter di atas permukaan laut, menjadikannya cocok untuk berbagai jenis tanaman, masyarakat Desa Dermasuci mayoritas bekerja sebagai petani (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023)

Tabel 4.1 Topografi Desa, Koordinat dan Ketinggian Letak Kantor Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pangkah

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Topografi Desa <i>Village Topography</i>	Koordinat Garis Lintang Coordinat Latitude	Koordinat Garis Bujur Coordinat Longitude	Ketinggian Letak Kantor Desa/Kel (m) Altitude Of Village (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pener	daratan	70,193	109,1527	74
Dermasuci	bukit	70,423	109,1447	126
Dukuhjati Kidul	daratan	70,036	109,1681	49
Depok	daratan	70,086	109,1573	58
Penusupan	daratan	70,093	109,1525	59
Bogares Kidul	daratan	69,996	109,1653	43
Bogares Lor	daratan	69,842	109,1694	40
Pangkah	daratan	69,823	109,1636	41
Curug	daratan	69,780	109,1563	41
Dukuhsembung	daratan	69,788	109,1479	42
Kendal Serut	daratan	69,659	109,1454	37
Grobog Kulon	daratan	69,600	109,1506	32
Grobog Wetan	daratan	65,750	109,0938	36
Talok	daratan	69,665	109,167	33
Paketiban	daratan	69,662	109,1765	33
Rancawiru	daratan	69,545	109,181	33
Balamoa	daratan	69,491	109,1841	30
Dermasandi	daratan	66,481	109,1825	31
Purbayasa	daratan	69,476	109,1758	29
Jenggawur	daratan	69,517	109,1707	27
Kalikangkung	daratan	69,465	109,1649	26
Pecabeian	daratan	69,457	109,1517	27
Bedug	daratan	69,426	109,1408	30

Sumber: (BPS Kabupaten Tegal, 2022)

Dapat dilihat bahwa hanya Desa Dermasuci saja yang memiliki topografi bukit, sedangkan desa lainnya adalah daratan. Kemudian jumlah Rukun Warga sebanyak 5 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 26 RT (BPS Kab. Tegal). Distribusi penduduk laki-laki per 2022 sebanyak 1.824 jiwa dan perempuan sebanyak 1.741 jiwa dengan total 3.565 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Dermasuci sebanyak 1.141 KK. Untuk fasilitas umum, Desa Dermasuci memiliki sebanyak 12 mushola, penggunaan listrik total 1.207, tidak ada yang berlangganan PDAM. Desa Dermasuci per 2022 juga belum memiliki angkutan umum (Badan Pusat Statistik Indonesia Kabupaten Tegal, 2023).

4.2 Pemerintahan Desa Dermasuci

Susunan Pemerintahan Desa Dermasuci adalah berikut :

Table 4.2 Perangkat Desa Dermasuci

Nama	Jabatan	Tugas
Mulyanto	Kepala Desa	Mengatur, mengarahkan, dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat desa
Santoso	Sekretaris Desa	Fungsi utamanya adalah mendukung kelancaran administrasi desa, mulai dari laporan keuangan hingga pengarsipan dokumen penting seperti data penduduk.
M. Durochim	Kasi Pembangunan	Mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di desa.
Edi Suminto	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia mengelola program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan keagamaan di desa.
N. Radianto	Kasi Pelayanan	Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini meliputi penerbitan surat keterangan, pembuatan dokumen kependudukan, hingga pengurusan izin-izin sederhana.
Endi Yuni Tuter Arima Negar	Kepala Urusan Keuangan	Mengelola semua urusan keuangan desa. Ia bertugas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran desa, menyusun laporan keuangan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan.
Diana Yusuf	Kepala Urusan Perencanaan	Melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan

		mengkoordinasikan rencana pembangunan desa.
Khoerul Bachri	Kepala Urusan Umum	Mengelola administrasi umum di desa, termasuk surat-menyurat, inventarisasi aset desa, dan kebutuhan operasional perangkat desa.
Reza Rizku	Kepala Dusun	Kepala Dusun adalah pemimpin di tingkat dusun (bagian kecil dari desa). Bertugas memimpin warga dusun, menyampaikan kebijakan desa kepada masyarakat, dan menjadi penghubung antara dusun dan pemerintah desa. Selain itu, Kepala Dusun juga membantu mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pemerintah desa di wilayahnya, seperti pembangunan jalan dusun atau kegiatan sosial masyarakat.

Sumber: Pemerintah Desa Dermasuci, 2024

Kantor Kepala Desa Dermasuci berlokasi di Jalan Cinawi Satu, Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52471. Namun dikarenakan bencana tanah bergerak pada tahun 2022 silam, kondisi kantor kepala desa masih belum dapat beroperasi seperti biasanya.

4.3 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Dermasuci

Kondisi sosial masyarakat Desa Dermasuci menunjukkan pola kehidupan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Berikut merupakan jenis pekerjaan masyarakat di Desa Dermasuci yang bisa dilihat di tabel berikut:

Table 4.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Dermasuci

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	PNS	1	0,05%
2.	Pedagang	451	22,39%
3.	Petani	107	5,31%
4.	Buruh	1396	69,30%
5.	TNI/POLRI	1	0,05%
6.	Lainnya	58	2,88%
Jumlah		2014	100%

Sumber: Pemerintahan Desa Dermasuci, 2024

Jenis pekerjaan masyarakat di Desa Dermasuci didominasi oleh buruh, dengan jumlah 1.396 orang (69,30%), yang merupakan mayoritas dari total populasi pekerja. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Dermasuci bekerja di sektor yang membutuhkan tenaga kerja fisik dan keterampilan non-formal. Pedagang menempati posisi kedua dengan jumlah 451 orang (22,39%), menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup aktif dalam perdagangan, baik formal maupun informal. Petani berjumlah 107 orang (5,31%), yang mengindikasikan keterlibatan masyarakat di sektor agraris masih ada, tetapi tidak mendominasi. Jenis komoditi utama di Desa Dermasuci adalah jagung. PNS (Pegawai Negeri Sipil) hanya 1 orang (0,05%), menunjukkan keterwakilan sektor pemerintahan yang sangat kecil di desa ini. TNI/POLRI juga hanya 1 orang (0,05%). Lainnya berjumlah 59 orang (2,88%), yang mencakup pekerjaan seperti pengrajin, pekerja lepas, atau pekerjaan yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya. Total jumlah pekerja adalah 2.014 orang, dominasi buruh sebagai profesi utama menunjukkan bahwa Desa Dermasuci merupakan wilayah dengan basis ekonomi yang bergantung pada sektor informal

atau industri padat karya. Rendahnya jumlah PNS dan petani mengindikasikan perubahan pola pekerjaan atau kurangnya peluang di sektor-sektor tersebut (hasil wawancara dengan warga, 2024).

Kemudian untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Dermasuci dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Dermasuci Per Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tamat TK / RA	382	13,57%
2.	Tamat SD Sederajat	1706	60,60%
3.	Tamat SLTP Sederajat	464	16,48%
4.	Tamat SLTA Sederajat	263	9,34%
5.	Kelompok Bermain	0	0,00%
Jumlah		2815	100%

Sumber: Pemerintahan Desa Dermasuci, 2024

Menurut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Dermasuci pada tahun 2023, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Terdapat 382 orang (13,57%) yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA), yang menunjukkan bahwa meskipun ini adalah tahap pendidikan awal, terdapat sejumlah anak yang telah mengenyam pendidikan dasar tersebut. Kemudian jumlah terbesar terdapat pada kelompok ini, dengan 1.706 orang (60,60%) yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di desa ini telah cukup diakses oleh sebagian besar masyarakat, namun angka ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar saja.

Kemudian sebanyak 464 orang (16,48%) berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) atau sederajat. Meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat SD, angka ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk tingkat SLTA hanya 263 orang (9,34%) yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat. Jumlah ini relatif lebih kecil, mencerminkan bahwa pendidikan menengah atas masih terbatas di kalangan masyarakat Desa Dermasuci. Terakhir tidak ada data untuk kelompok bermain, yang menunjukkan bahwa pendidikan usia dini selain TK/RA tidak banyak tersedia atau tidak tercatat.

Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa meskipun pendidikan dasar di Desa Dermasuci cukup baik dengan banyaknya orang yang menyelesaikan SD, namun pendidikan menengah atas (SLTA) masih terbatas. Hal ini berkesinambungan dalam memengaruhi peluang kerja atau pengembangan keterampilan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat desa.